



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 68.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Simalungun Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Anggaran dan realisasi belanja daerah belum memenuhi *mandatory spending* sehingga mengakibatkan risiko tidak tercapainya target percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi yang dianggarkan melalui belanja infrastruktur;
2. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan atas dana BOSP belum tertib;
3. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.714.320.391,41; dan
4. Pengelolaan aset tetap belum memadai sehingga mengakibatkan penyajian Informasi BMD yang disajikan pada kartu inventaris barang belum menggambarkan kondisi sebenarnya dan Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca tidak memberikan informasi yang andal.

Handwritten signature/initials

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Simalungun antara lain agar:

1. Bersama dengan DPRD agar berkomitmen untuk menyusun *Action Plan* dalam menganggarkan belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan dan memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian alokasi belanja *mandatory spending*;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal dalam mengawasi dan pembinaan pengelolaan dana BOSP;
3. Memerintahkan Kepala Dinas PUTR memproses kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp1.714.320.391,41;
4. Memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan BMD;
 - b. Kepala BPKPD selaku Pejabat Penatausahaan Barang mengamankan aset tanah milik daerah melalui penyertifikatan tanah;
 - c. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang:
 - 1) Menindaklanjuti penyelesaian permasalahan Aset Tetap pada LHP BPK tahun sebelumnya terhadap Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya; dan
 - 2) Menginstruksikan masing-masing pengurus barang untuk menjamin kelengkapan dan keandalan informasi BMD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. The stamp contains the text "BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ramzuhri, SE., M.Si., Ak., CA, CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA-6276